

**ANALISIS CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA PASCA KEBIJAKAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : DEA AMANDA RIANTO
Npm : 2005180004
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DEA AMANDA RIANTO
NPM : 2005180004
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI
PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA KEBIJAKAN DANA
DESA (STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Penguji II

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : DEA AMANDA RIANTO
NPM : 2005180004
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Penelitian : ANALISIS CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI
PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA KEBIJAKAN
DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN DELI
SERDANG)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan tugas akhir.

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



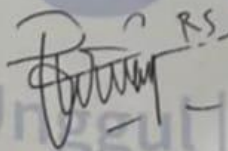
Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : DEA AMANDA RIANTO
NPM : 2005180004
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Penelitian : ANALISIS CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA KEBIJAKAN DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas Akhir	Paraf
27/08/2024	Bab IV : Bimbingan Hasil dan Pembahasan, babaran umum Penelitian, kondisi Geografi, dan kondisi topografi	
02/09/2024	Bab IV : Revisi Gambar dan Tabel pertumbuhan ekonomi	
06/09/2024	Bab IV : Revisi Indikator Sosial	
09/09/2024	Bab IV : Revisi tabel Indeks Pembangunan Desa (IPD)	
17/09/2024	Bab IV : Revisi tabel olahan regresi dan pengujian	
23/09/2024	Bab IV : Revisi Pembahasan hasil regresi	
07/10/2024	Bab V : membuat kesimpulan dan saran.	
14/10/2024	ACC Ujian	

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Medan, Oktober 2024
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dea Amanda Rianto

NPM : 2005180004

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul “**Analisis Capaian Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Dea Amanda Rianto

ABSTRAK

ANALISIS CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA KEBIJAKAN DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG)

Dea Amanda Rianto

Ekonomi Pembangunan

Email : deaamandr09@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017, 2020 dan 2023 di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang (selama 5 – 10 Tahun), dan Melakukan estimasi tentang variabel Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, PDRB perkapita, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2023(selama 10 tahun). Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan PDRB per Kapita (PDRB_PK) merupakan satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan IDM. Peningkatan PDRB per kapita desa berhubungan positif dengan peningkatan pembangunan desa. Variabel lain seperti Dana Desa (DD), Persentase Penduduk Miskin (PP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Meskipun koefisiennya positif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik pada sampel data yang digunakan. Nilai p-value yang tinggi pada beberapa variabel menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi IDM, yang belum tercakup dalam model ini. (selama 5 – 10 Tahun). Hasil estimasi model Ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun adalah negatif dan sesuai dengan hipotesa penelitian dimana variabel Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan variabel Produk Domestik Bruto Regional Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa membangun.

Kata Kunci ; Indeks Desa Membangun, Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, PDRB Perkapita, Indeks pembangunan manusia

ABSTRACT

ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT ACHIEVEMENTS IN NORTH SUMATERA PROVINCE AFTER VILLAGE FUND POLICY (CASE STUDY OF DELI SERDANG REGENCY)

Dea Amanda Rianto

Economic development

Email : deaamandr09@gmail.com

The objective of this study is to conduct a descriptive economic analysis of the development of the Village Development Index (IDM) in 2017, 2020, and 2023 in North Sumatra Province and Deli Serdang Regency (over a period of 5-10 years), and to estimate the influence of Village Funds, Government Expenditure, GDP per capita, and the Human Development Index (HDI) on the Village Development Index (IDM) in Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, from 2013 to 2023 (over a period of 10 years). The research employs a mixed method approach, combining qualitative descriptive and quantitative methods. The results of this study indicate that the development of GDP per capita (PDRB_PK) is the only variable that has a significant influence on the improvement of IDM. The increase in village GDP per capita is positively correlated with the increase in village development. Other variables, such as Village Funds (DD), the Percentage of Poor Population (PP), and the Human Development Index (HDI), do not have a statistically significant influence on IDM. Although the coefficients are positive, their impact is not strong enough to be statistically significant in the sample data used. The high p-value of some variables suggests that other data or variables, which are not included in this model, may have a more dominant effect on IDM. (over a period of 5-10 years). The econometric model estimation of the factors influencing the Village Development Index shows that the variables Village Funds, Government Expenditure, and the Human Development Index have a significant impact, and the Regional Gross Domestic Product per capita variable also significantly influences the Village Development Index.

Keywords: Village Development Index, Village Funds, Government Expenditure, GDP per Capita, Human Development Index

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Capaian Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki, dan ilmu kepada saya dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih untuk yang tercinta Mama, dan Alm.Papa yang telah memberikan doa, rasa cinta, kasih sayang, dan dukungan yang luar biasa serta mendidik dan mendukung saya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 8. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 9. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberi arahan kepada saya tentang menulis tugas akhir ini.
 10. Bapak dan Ibu Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
 11. Bapak dan Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam hal akademik.
 12. Kepada abang (Dana Alpian Rianto), dan adik (Muhammad Rafa Rianto) yang selalu memberikan doa dan semangat bahagia kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 13. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian ini yang tidak dapat dituliskan satu demi satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.
- Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi

semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2024
Penulis

Dea Amanda Rianto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	20
1.3 Batasan masalah	20
1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	21
1.5 Manfaat Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Landasan Teoritis	23
2.1.1 Pembangunan ekonomi	23
2.1.2 Teori Pendapatan Nasional.....	38
2.1.3 Regulasi Pemerintah.....	48
2.3 Penelitian Terdahulu	55
2.4 Kerangka Konseptual Model Ekonometrika.....	56
2.5 Hipotesis.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Pendekatan Penelitian	57
3.2 Tempat dan waktu penelitian	57
3.3 Jenis dan Sumber data	58
3.4 Defenisi Operasional	58
3.5 Teknik pengumpulan data	59
3.6 Model Estimasi.....	59
3.7 Metode Estimasi.....	59
3.8 Teknik analisis data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Penelitian	65
4.1.1 Kondisi Geografi	65
4.1.2 Kondisi Topografi	65
4.1.3 Kondisi Demografi	67
4.1.4 Indikator Ekonomi.....	69
4.1.5 Indikator Sosial.....	74
4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang.	77
4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang	77
4.2.2 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang	85
4.1.3 Indeks Membangun Desa (IDM) Pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,2020,2023	88

4.1.5	Indeks Membangun Desa (IDM) Pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017,2020,2023	89
4.3	Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mencapai IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.	89
4.3.1	Pengujian (Test Diagnostic)	89
4.4	Pembahasan Hasil Regresi	99
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020.....	17
Tabel 1.2.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	18
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Deli Serdang Tahun 2023	67
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.....	68
Tabel 4.4	PDRB Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019 - 2023 (persen).....	69
Tabel 4.5	PDRB Per Kapita Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2019-2023 (ribu rupiah).....	72
Tabel 4.6	Gini Rasio.....	73
Tabel 4.6	Angka Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang.....	74
Tabel 4.7	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang	75
Tabel 4.8	Harapan Hidup.....	75
Tabel 4.12	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	76
Tabel 4.13	Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2014	81
Tabel 4.15	Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018.....	84
Tabel 4.16.	Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Kabupaten Deli Serdang dan Sumatera Utara	85
Tabel 4.13	Indikator Variabel Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM)88	
Tabel 4.16	Hasil Olahan Regersi	89
Tabel 4.17	Ringkasan Hasil Pengolahan	90
Tabel 4.18	Hasil Uji t – Statistik	95
Tabel 4.19	Hasil Uji F	96
Tabel 4.20	Hasil Uji Multikolinearitas	97
Tabel 4.21	Hasil Uji Heterokedastisitas	98
Tabel 4.22	Hasil Uji Autokorelasi.....	99

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1.	Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1969 – 2019	4
Gambar 1.2	Perkembangan Anggaran Dana Desa tahun 2015 – 2021	11
Gambar 1.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Desa	13
Gambar 1.3	Indeks Desa Membangun 2019-2020.....	14
Grafik 2.1	Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross	
Grafik 2.2	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	46
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	55
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual Model Ekonometrika	56
Gambar 3.1	Grafik kriteria pengujian hipotesis	62
Gambar 3.2.	Grafik Kreteria Pengujian Hipotesis Uji f.....	62
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021,2022 dan 2023	71
Gambar 4.3	Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang	73
Gambar 4.4	Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang	75
Grafik 4.1	Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2014 .	80
Grafik 4.14	Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018 .	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk menciptakan kesejahteraan dan memberikan alternatif kehidupan kepada masyarakat yang lebih luas. Pembangunan dapat disebabkan oleh dorongan yang berasal dari kebudayaan dan akan berakibat kepada masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut pembangunan Indonesia merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program terselesaikan.

Sejalan dengan bertambah besarnya perhatian yang diberikan dalam membangun negara-negara berkembang maka makin meluas pula kesadaran bahwa tugas membangun negara-negara itu bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Masalah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks dan sangat berlainan sifatnya dengan masalah pembangunan yang pernah dihadapi oleh negara-negara maju. Sangat kompleksnya masalah pembangunan dan banyaknya faktor penyebab terpenting dari keadaan tersebut; menyebabkan topik yang dianalisa dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas sekali. Faktor lainnya adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi sampai saat sekarang belum mencapai konsensus mengenai faktor-

faktor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana proses pembangunan ekonomi berlaku.

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi antara lain:

1. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, Negara-negara Afrika, dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Perhatian terhadap masalah pembangunan negara-negara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan yaitu perasaan perikemanusiaan yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju dan untuk mendapat dukungan politik, seperti perhatian yang sering diberikan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang.

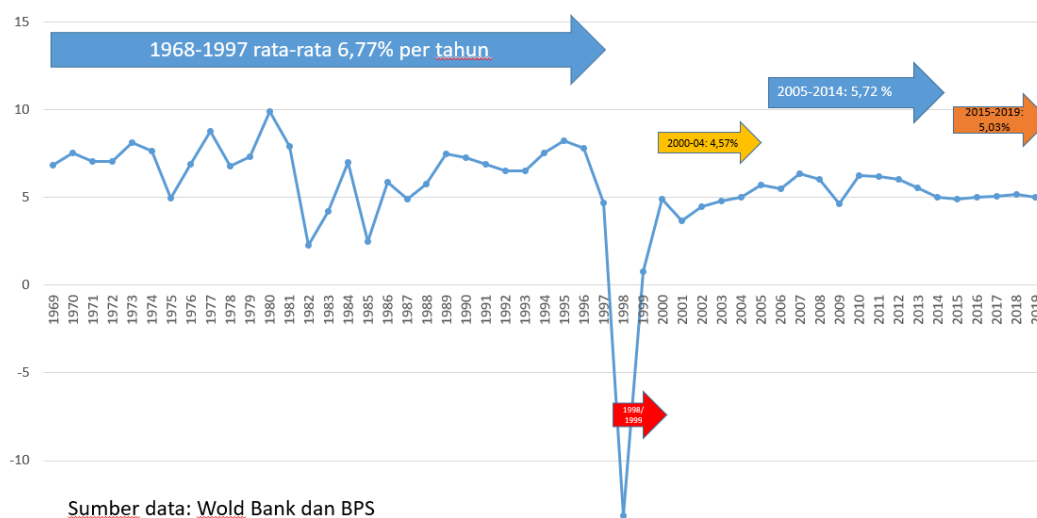
Pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mencerminkan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sudah maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang. Akhirnya, suatu perekonomian baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan

kecenderungan yang menaik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor, misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat temporer, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Sebagai Negara berkembang sejak tahun 1969 Indonesia gencar melakukan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional secara menyeluruh sebagai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sesuatu hal yang umum jika perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan.

Adapun laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha tahun 1969-2019 adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1969 - 2019



Sumber : World Bank, 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami fluktuasi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 berimbas kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi secara drastis ke angka 13,12 %. Banyak upaya yang pemerintah lakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh berhasil memulihkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai stabil dan beranjak naik sedikit demi sedikit di tahun berikutnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami guncangan pada tahun 2009 yaitu mengalami penurunan dari 6,01% menjadi 4.63% akibat dari krisis global tahun 2008. Pemerintah segera mengambil tindakan cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi yang pada akhirnya mampu membangkitkan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh pembangunan manusia, yang merupakan indikator penting masa depan. Konsep modal manusia, juga dikenal sebagai Human Development Index (HDI) atau IPM, diperkenalkan oleh Program

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk tujuan mengevaluasi tingkat modal manusia. Berdasarkan tiga indikator-tingkat melek huruf, harapan saat lahir, rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah, dan paritas daya beli. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran tingkat pembangunan suatu wilayah atau negara. Jika Indeks pembangunan Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi modern, maka untuk menghasilkan faktor produksi yang dapat dimaksimalkan perlu adanya pembangunan manusia yang berkualitas. Penghuni yang berkualitas akan mampu mengembangkan faktor produksi yang ada dan berinovasi. Agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertentu maka perlu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan akan segera tercapai dan diharapkan akan meningkat dengan distribusi pendapatan.

Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi pada era Jokowi banyak merealisasikan kebijakan pembangunan dengan melakukan pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas ekonomi baik orang maupun barang dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat indonesia, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pada lima tahun terakhir atau periode pertama (2014-2019) era pemerintahan JOKOWI-JK, berbagai infrastruktur yang dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) turut berkontribusi pada berbagai capaian pemerintah. Diantaranya peningkatan daya saing global Indonesia serta mengukur kesenjangan ekonomi.

Tabel 1.1 Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Provinsi (Persen)

Provinsi	Laju PDRB Menurut Provinsi (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	4.61	4.15	-0.37	2.79	4.21
Sumatera Utara	5.18	5.22	-1.07	2.61	4.73
Sumatera Barat	5.16	5.05	-1.61	3.29	4.36
Riau	2.37	2.84	-1.13	3.36	4.55
Jambi	4.74	4.40	-0.51	3.69	5.13
Sumatera Selatan	6.04	5.71	-0.11	3.58	5.23
Bengkulu	4.99	4.96	-0.02	3.27	4.31
Lampung	5.25	5.27	-1.66	2.77	4.28
Kep. Bangka Belitung	4.46	3.32	-2.29	5.05	4.40
Kepulauan Riau	4.58	4.89	-3.80	3.43	5.09
DKI Jakarta	6.17	5.89	-2.39	3.56	5.25
Jawa Barat	5.66	5.07	-2.52	3.74	5.45
Jawa Tengah	5.31	5.41	-2.65	3.33	5.31
DI Yogyakarta	6.20	6.60	-2.67	5.58	5.15
Jawa Timur	5.50	5.52	-2.33	3.56	5.34
Banten	5.82	5.53	-3.39	4.49	5.03
Bali	6.33	5.63	-9.34	-2.46	4.84
Nusa Tenggara Barat	-4.46	4.01	-0.62	2.30	6.95
Nusa Tenggara Timur	5.13	5.20	-0.84	2.52	3.05
Kalimantan Barat	5.07	5.00	-1.82	4.80	5.07
Kalimantan Tengah	5.65	6.16	-1.41	3.59	6.45
Kalimantan Selatan	5.12	4.08	-1.82	3.48	5.11
Kalimantan Timur	2.67	4.77	-2.90	2.55	4.48
Kalimantan Utara	6.05	6.91	-1.09	3.98	5.34
Sulawesi Utara	6.01	5.66	-0.99	4.16	5.42
Sulawesi Tengah	6.28	7.15	4.86	11.70	15.17
Sulawesi Selatan	7.06	6.92	-0.71	4.64	5.09
Sulawesi Tenggara	6.42	6.51	-0.65	4.10	5.53
Gorontalo	6.50	6.41	-0.02	2.41	4.04
Sulawesi Barat	6.25	5.66	-2.34	2.57	2.30
Maluku	5.94	5.57	-0.91	3.05	5.11
Maluku Utara	7.92	6.13	5.39	16.79	22.94
Papua Barat	6.25	2.66	-0.76	-0.51	2.01
Papua	7.37	-15.72	2.39	15.16	8.97
Indonesia	5.32	5.00	-2.07	3.70	5.31

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB menurut Provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi yaitu di tahun 2018 sebesar 5,32 % di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,00% sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -2,07% hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid 19. Ditahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur membaik menjadi 3,70% dan di tahun 2022 terus mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 5,31%.

Salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi daerah, Pemerintahan Jokowi membentuk kebijakan/konsep membangun dari pinggiran. Penerapan konsep “membangun dari pinggiran” dewasa ini dilingkupi oleh situasi semangat kebijakan fiskal yang menekankan pembangunan infrastruktur khususnya dengan tujuan mengembangkan konektivitas wilayah-wilayah pinggiran dengan wilayah-wilayah yang secara ekonomis lebih berkembang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tersebut terfokus pada pembangunan prasarana dan sarana transportasi seperti jalan raya (termasuk jalan tol), jembatan, bandar udara, pelabuhan laut (secara lebih luas disebut tol laut), dan sebagainya, di samping infrastruktur-infrastruktur lainnya. Kebijakan ini menekankan pentingnya wawasan jangka panjang, dalam arti bahwa imbalannya (returns on investment) baru dapat dipetik lama setelah investasi ditanamkan. Pilihan ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengelolaan fiskal yang tidak ringan serta pengelolaan kepercayaan publik yang cukup berisiko.

Konsep otonomi daerah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ada 3 (tiga) alasan pokok mengapa dipelukannya otonomi daerah yaitu pertama, *political equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua, *local accountability*, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Ketiga, *local responsiveness*, yaitu meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya.

Adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hal yang spesial yang dimiliki oleh daerah lokal yang ada di masyarakat masing-masing daerah. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah bisa mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata sehingga juga bisa mendorong perekonomian yang ada di daerah itu. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2001 bertumpu pada alokasi pusat kepada daerah yang dikenal sebagai dana perimbangan. Selama hampir 10 (sepuluh) tahun berjalannya desentralisasi fiskal, telah dialokasikan secara signifikan dana perimbangan ke daerah, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam.

Dana Transfer ke Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Disamping itu, pada saat ini kebijakan Transfer ke Daerah tidak hanya berfokus pada pemerintah Provinsi. Namun, saat ini pembangunan daerah dan desa juga merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi sebagaimana tercantum dalam Nawa cita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pembangunan desa atau daerah saat ini sudah jelas menjadi prioritas pemerintah Indonesia terbukti dengan lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pembangunan Desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan Desa. Salah satu sumber penerimaan Desa yaitu dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap Desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana Desa. Anggaran alokasi dana Desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi Desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat peDesaan.

Adanya prioritas pembangunan wilayah desa ini dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya mengurangi terjadinya migrasi penduduk desa ke wilayah kota. Hal ini dapat terjadi dengan adanya pembangunan infrastruktur desa, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-undang desa juga mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta masyarakat Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007, Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar 1 Miliar rupiah per desa untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya diperuntukan untuk membangun desa dan diharapkan masyarakat desa untuk mengembangkan desanya.

Gambar 1.2. Perkembangan Anggaran Dana Desa tahun 2015 – 2021



Dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 anggaran desa hanya sebesar 20,8 milyar rupiah, mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 59,9 milyar dan 2019 sebesar 69,8 milyar rupiah hingga pada tahun 2021 diketahui total anggaran dana desa mencapai 72 milyar rupiah, di tahun 2024 sebesar 71 untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.

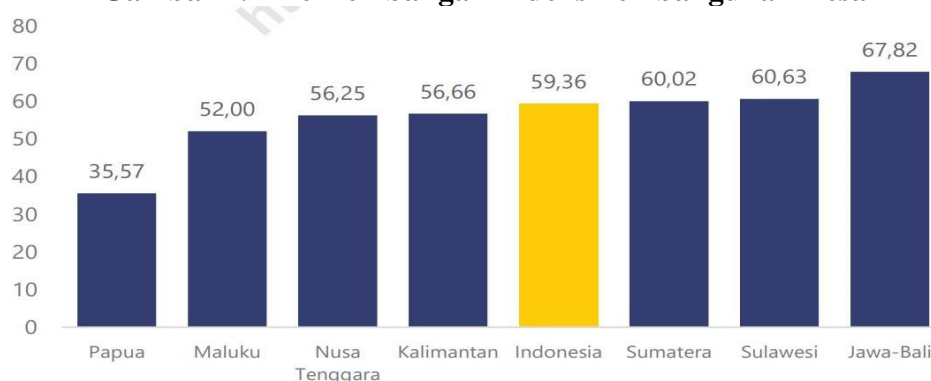
Pembangunan Desa menjadi bagian penting yang menjadi target pemerintah, tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Tujuan pembangunan desa ini untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa ditahun 2019. Pada awal RPJMN, pemerintah telah memetakan jumlah wilayah administrasi desa yang teregistrasi melalui Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 74.093 desa.

Kondisi perkembangan pembangunan desa telah digambarkan dalam beragam indeks. Setidaknya ada tiga indeks yang dihitung dan memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berfungsi sebagai penentu pembagian dana desa. Semakin bagus pembangunan desa, maka nilai kesulitannya semakin berkurang. Indeks yang kedua yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang bertujuan untuk melihat capaian pembangunan layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat desa. Semakin baik pembangunan desa, semakin mandiri desa tersebut untuk meningkatkan daya saing desa. Ketiga, Indeks Desa Membangun (IDM) yang berfungsi menilai keberlangsungan pembangunan desa. Pembangunan desa yang baik, menggambarkan kualitas pembangunan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang baik juga.

Ketiga alat ukur pembangunan desa ini memiliki kekurangan serupa, yaitu ada indikator-indikator yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh paralegal dan pemangku kebijakan di desa. Salah satu contoh adalah fasilitas sekolah sebagai indikator layanan pendidikan dasar, dimana pemerintah desa tidak mampu membangun sekolah. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan

PDT nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, pemerintah desa tidak dapat mendirikan fasilitas tersebut karena peraturan tersebut sudah sangat detail mengatur infrastruktur apa saja yang dapat dibangun pemerintah desa dengan Dana Desa. Selain itu, masih banyak indikator lain yang tidak bisa ditindak lanjuti.

Gambar 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Desa (www.bps.go.id)

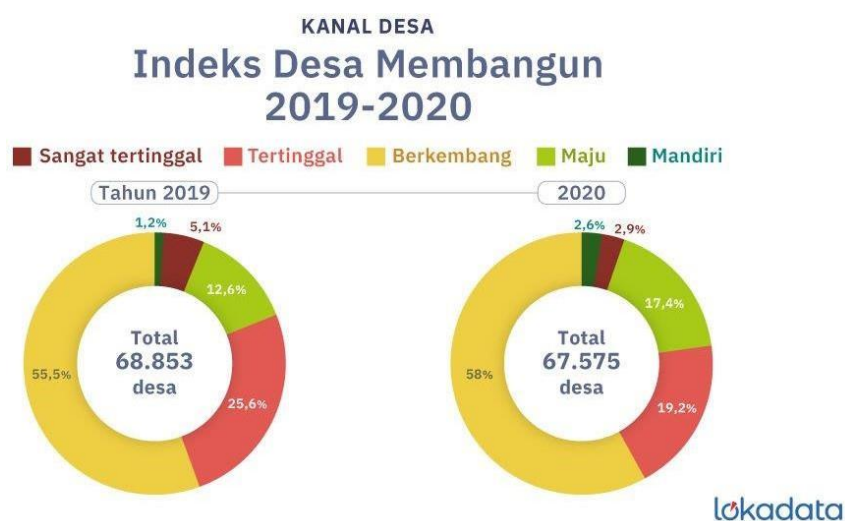
Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Nilai IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau yang rata-rata indeksnya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau

tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

Perkembangan wilayah desa ada dua indikator yaitu, IDM (Indeks Desa Membangun) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Gambar 1.3. Indeks Desa Membangun 2019-2020



Sumber : lokadata.com

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2019-2020 kondisi desa di Indonesia kondisi desa mengalami perkembangan. Dimana, dapat kita lihat apabila tahun 2019 desa sangat tertinggal sebesar 5,1% pada tahun 2020 turun menjadi 2,9% dan pada desa tertinggal pada tahun 2019 presentase sebesar 25,6% pada tahun 2020 menurun menjadi 19,2% dan desa berkembang pada tahun 2019 sebesar 55,5% dan tahun 2020 naik sebesar 58%. Selanjutnya, untuk kategori desa maju dan mandiri juga mengalami peningkatan dimana kategori desa maju pada tahun 2019 sebesar 12,6% dan tahun 2020 sebesar 17,4% serta kategori desa mandiri pada tahun 2019 sebesar 1,2% dan tahun 2020 menjadi

2,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

IPD dan IDM memiliki sumber data yang sama, yakni dari hasil pendataan Podes. Hasil IPD 2018 menunjukkan ada sebanyak 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal. Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai IPD sebesar 59,36. IPD telah digunakan untuk merancang desa target RPJMN tahun 2015-2019. Adapun yang menjadi target capaian adalah berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa dan meningkatnya desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka klasifikasi desa berdasarkan IPD adalah Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Hasil dari penyusunan IPD ini adalah seluruh desa di Indonesia dapat terpetakan dengan baik berdasarkan tingkat perkembangan desa sesuai dengan klasifikasi IPD tersebut. Hingga saat ini, pengukuran pembangunan desa dengan IPD telah dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahap perencanaan dan evaluasi. Pertama pada tahap perencanaan, pengukuran dilaksanakan pada tahun 2015 dengan mengukur desa-desa yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2015. Data desa yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014. dan merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta kebijakan dana desa mempengaruhi perkembangan seluruh wilayah di Indonesia salah satunya yaitu Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu Provinsi yang berada di bagian barat Indonesia, terdapat 18 Kabupaten, 5 Kota, 289

kecamatan dan 6497 Kelurahan setelah adanya otonomi daerah pada tahun 1999. Sumatera Utara adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pengakuan negara atas Sumatera Utara terakhir diberikan melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2000 tentang pemerintahan Sumatera Utara (LN 2000 no 26, TLN 4633). UU pemerintahan Sumatera Utara ini tidak lepas dari nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).

Menurut Data yang dikutip oleh Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara pertama sekali menerima Dana Desa sebesar Rp 1,46 triliun pada tahun 2015. Jumlah Dana Desa tersebut terus meningkat secara fantastis hingga mencapai Rp. 4,45 triliun pada tahun 2019. Secara rinci dalam paparan Kemenkeu Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4,5 triliun untuk 5.417 Desa. Dan mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.915.875.054.000 (dalam ribuan). Pengalokasian dana desa di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1. Pengalokasian Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2020**

Nama Daerah	Jumlah Desa	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)		
		2019	2020	2021
Kab. Asahan	177	146.090.415	150.506.325	152.083.710
Kab. Dairi	161	127.172.564	130.304.470	129.738.730
Kab. Deli Serdang	380	306.386.948	312.277.329	312.546.966
Kab. Karo	259	197.078.926	201.208.286	198.409.273
Kab. Labuhan Batu	75	70.226.102	72.182.696	74.477.417
Kab. Langkat	240	205.446.268	211.213.265	213.259.749
Kab. Mandailing Natal	377	285.841.420	290.920.103	286.845.864
Kab. Nias	170	180.585.127	181.381.215	179.544.025
Kab. Simalungun	386	294.442.204	298.689.733	296.800.840
Kab. Tapanuli Selatan	211	167.751.279	172.034.790	169.754.513
Kab. Tapanuli Tengah	159	140.541.973	144.349.335	142.631.022
Kab. Tapanuli Utara	241	184.186.164	194.621.304	192.016.817
Kab. Toba Samosir	231	176.101.238	179.571.269	177.074.852
Kab. Pakpak Bharat	52	48.298.630	50.424.120	50.970.983
Kab. Nias Selatan	459	348.422.333	356.099.164	351.138.751
Kab. Humbang Hasundutan	153	123.336.297	126.028.454	124.934.505
Kab. Serdang Bedagai	237	184.774.302	187.834.594	185.739.448
Kab. Samosir	128	108.744.499	109.313.044	107.929.748
Kab. Batu Bara	141	118.843.171	121.634.028	121.071.737
Kab. Padang Lawas	303	230.097.858	233.549.721	230.275.200
Kab. Padang Lawas Utara	386	287.244.660	293.516.929	289.345.427
Kab. Labuhan Batu Selatan	52	61.548.371	65.076.224	67.788.110
Kab. Labuhan Batu Utara	82	79.123.527	83.576.158	86.022.841
Kab. Nias Utara	112	137.008.319	137.596.573	136.386.189
Kab. Nias Barat	105	114.000.248	118.531.988	117.397.253

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 2020 (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menerima anggaran dana Desa tahun 2021 terbesar berturut-turut adalah Kabupaten Nias Selatan (Rp.304.227.954), Kabupaten Deli Serdang (Rp.251.866.280), Kabupaten Simalungun (Rp.255.843.116), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Rp. 255.843.116). Menarik untuk diamati karena dari

kelima daerah tersebut Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang menerima alokasi dana Desa terbesar.

Salah satu indikator pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berikut ini merupakan IPM kabupaten di Sumatera Utara.

Tabel 1.2. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
01 N i a s	60,82	61,65	61,93
02 Mandailing Natal	65,83	66,52	66,79
03 Tapanuli Selatan	69,10	69,75	70,12
04 Tapanuli Tengah	68,27	68,86	69,23
05 Tapanuli Utara	72,91	73,33	73,47
06 Toba	74,48	74,92	75,16
07 Labuhanbatu	71,39	71,94	72,01
08 A s a h a n	69,49	69,92	70,29
09 Simalungun	72,49	72,98	73,25
10 D a i r i	70,89	71,42	71,57
11 K a r o	73,91	74,25	74,43
12 Deli Serdang	74,92	75,43	75,44
13 L a n g k a t	70,27	70,76	71,00
14 Nias Selatan	60,75	61,59	61,89
15 Humbang Hasundutan	67,96	68,83	68,87
16 Pakpak Bharat	66,63	67,47	67,59
17 Samosir	69,99	70,55	70,63
18 Serdang Bedagai	69,69	70,21	70,24
19 Batu Bara	67,67	68,35	68,36
20 Padang Lawas Utara	68,77	69,29	69,85
21 Padang Lawas	67,59	68,16	68,25
22 Labuhanbatu Selatan	70,98	71,39	71,40
23 Labuhanbatu Utara	71,08	71,43	71,61
24 Nias Utara	61,08	61,98	62,36
25 Nias Barat	60,42	61,14	61,51
Kota			
71 S i b o l g a	72,65	73,41	73,63
72 Tanjungbalai	68,00	68,51	68,65
73 Pematangsiantar	77,88	78,57	78,75
74 Tebing Tinggi	74,50	75,08	75,17

75 Medan	80,65	80,97	80,98
76 Binjai	75,21	75,89	75,89
77 Padangsidempuan	74,38	75,06	75,22
78 Gunungsitoli	68,33	69,30	69,31
Sumatera Utara	71,18	71,74	71,77

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten dengan nilai IPM yang rendah dimana nilai IPM Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 adalah sebesar 75,43 dan pada tahun 2020 hanya sebesar 75,44. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya yaitu pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan sosial ekonomi Kabupaten Deli Serdang secara menyeluruh, yang meliputi : pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, pemekaran ini dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai

PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima oleh Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi salah satu peluang besar bagi Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan pembangunan daerahnya.

Menurut uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Capaian Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang maksimal di Kabupaten Deli Serdang.
2. Alokasi dana desa belum terealisasi dengan maksimal.
3. Pemerintah desa belum memahami bagaimana pengalokasian dana desa yang efektif.
4. Tingkat pembangunan di Kabupaten Deli Serdang tidak merata.
5. Belum optimalnya pemerintah daerah mengelola potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Batasan masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah difokuskan pada perkembangan capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun Desa (IDM) terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017, 2020 dan 2023 di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang.
2. Melakukan estimasi tentang variabel Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, PDRB perkapita, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Akademik

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnahkan penelitian tentang Analisis perkembangan indeks pembangunan desa (IPD) dan indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Deli Serdang.

1.5.2 Non Akademik

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini di jadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Analisis pembangunan wilayah desa di kawasan Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi *stakeholder*, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan IDM dan IPD di kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pembangunan ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran 14 melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering

dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

A. Aliran Klasik

1. Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka

secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan

pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

a. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja

dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

2. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan

internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

3. Teori Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

1. Menurut Marx berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap:
2. Masyarakat kumunal primitif, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
3. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik faktor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah harga buruh maka minat pemilik faktor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
4. Masyarakat feodal, kaum bangsawan memiliki faktor produksi utama yaitu tanah. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sektor pertanian. Kepentingan dua

kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system fiodal. Kelas borjuis yang memilki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tariff serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini

5. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
6. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.
7. Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya :
 - a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
 - b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semain luas

- c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
- d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

B. Aliran Kontrarevolusi Neo-klasik / Fundamintalisme Pasar

Menurut teori ini pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor: kenaikan kuantitas & kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

1. Aliran Neo-Klasik

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

a. Akumulasi Kapital

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/ relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

b. Perkembangan sebagai proses Gradual / terus-menerus

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

c. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena

adanya internal economies & external economies. Internal Economies timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan sebagainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

d. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

e. Aspek internasional perkembangan ekonomi tingkat perkembangan ekonomi:

- 1) Mula-mula Negara meminjam capital / impor capital.
- 2) Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.
- 3) Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasional Negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.

- 4) Tingkat keempat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak.
- 5) Akhirnya Negara itu hanya selalu menerima deviden dan bunga saja dari Negara lain.

2. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Satagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber

peningkatan *output* masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs.*). *Inovasi disini* bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menimbulkan perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

3. Analisis post Keynesian

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba merumuskan perluasan teori keynes. post-keynesian memperluas sistem menjadi teori output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dalam analisis ini persoalan yang penting ialah:

- A. Syarat yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapat yang mantap (*steady growth*) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi atau inflasi.
- B. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau terus menerus.

4. Teori Harrod-Domar

Pada hakikatnya teory Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teory makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena mengungkapkan masalah – masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teory Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teory ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantab. Menurut teory Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi yakni:

- A. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full empyloyment*) dan faktor – faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh.
- B. Perekonomian tterdiri dari dua sector: sector rumah tangga dan sector perusahaan.

- C. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- D. Kecenderungan menabung besarnya tetap.

5. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut:

- A. Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)
- B. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- C. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- D. Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- E. *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran. Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

6. Teori Harrod

Harrod menyelediki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ($GC=IS$) dimana G adalah tingkat pertumbuhan output atau perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu. C adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan

pendapatan (I/DY) dan S adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi.

7. Teori Stagnasi Sekular (*Secular Stagnation*)

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi. Perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah:

- A. Menitik beratkan pada peranan faktor faktor eksogen seperti teknologi, perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah baru. Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar. Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja.

- B. Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga sosial seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.
- C. Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.

2.1.2 Teori Pendapatan Nasional

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. “Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari output dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh, Quesney adalah dokter resmi bagi king louis xv dari Prancis”. Manurung (2008).

Ukuran kasar dari pendapatan nasional dikembangkan di Inggris sekitar dua abad lalu, tetapi perhitungan rinci untuk data ekonomi mikro dikembangkan di Amerika selama *The Great Depression*. Hasil berupa sistem perhitungan pendapatan nasional mencakup sejumlah besar data yang dihimpun dari berbagai sumber di Amerika. Data tersebut diringkas dan dirakit menjadi kerangka yang saling terkait, dan kemudian dilaporkan secara priode oleh pemerintah federal. Perhitungan pendapatan nasional Amerika adalah yang paling luas dilaporkan dan yang paling diamati di seluruh dunia. Simon Kuznets sebagai salah satu pengembang perhitungan tersebut memperoleh penghargaan hadiah nobel.

“Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi penerimaan orang lain. Ide bahwa belanja sama dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada output agregat dicatat pada sisi buku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut”. Manurung (2008)

A. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paaling mudah dalam memahami pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen: konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu. Manurung (2008)

Konsumsi atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun, sop, dan pembelian barang tahan

lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun.

Investasi, atau secara spesifik *investasi domestik swasta bruto* adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak digunakan pada saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik *konsumsi dan investasi bruto pemerintah*, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran tranfer, seperti social security, bantuan pemerintah kepada penerimaan bantuan dalam pengertian sebenarnya.

Komponen terakhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa (invisibles, seperti pariwisata, asuransi, akuntansi dan konsultasi). mengingat belanja untuk konsumsi, investasi

dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto yaitu nilai ekspor (X), dikurangi dengan nilai impor (M), atau (X-M). Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP

B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut yaitu upah, bunga, sewa dan laba dari produksi. Harga *Hershey bar* mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga sehingga batangan permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa Pengeluaran Agregat = GDP = Pendapatan Agregat

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan

mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input dari perusahaan lain. Nilai tambah setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

Rudy Badrudin menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

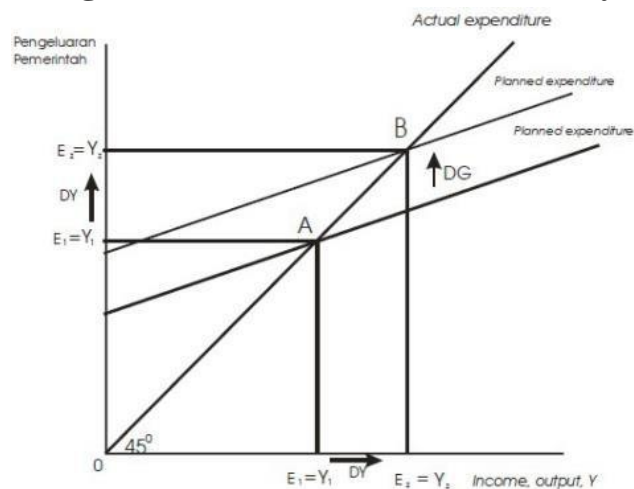
Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran 35 pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263).

Grafik 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross



Sumber : Mankiw, 2003; 263

Pada grafik 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, 37 sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1993; 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Mangkoesobroto menjelaskan dalam bukunya bahwa model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

A. Hukum Wagner

Hukum Wagner yang dijelaskan oleh Mangkoesobroto mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19, hukum tersebut berbunyi : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini memiliki kelemahan karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangan dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$P_k PP_1 (P_k PP_2 (... P_k PP_n$$

$$PPK_1 PPK_2 PPK_n$$

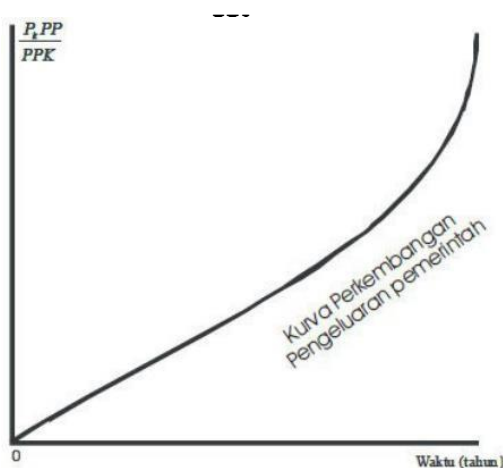
PkPP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

n : jangka Waktu (Tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 2.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

Grafik 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut



Sumber : Mangkoesoebroto, 1993; 172

B. Teori Peacock dan Wiseman

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesebroto : 173). Teori mereka sering disebut sebagai The Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman 40 mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesebroto : 173) :

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga.

2.4.1 Regulasi Pemerintah

A. Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menurut UU No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi daerah otonom, artinya penetapan kebijakan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah sendiri (Aser,2005).

Sistem pemerintahan republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonomi daerah yang terbagu dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “ Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada masa sebelum otonomi daerah, semua wewenang pemerintah dipegang oleh pemerintah pusat, daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah membuat wewenang pemerintah daerah semakin besar. Kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Prinsip pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa sekarang ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada daerah tingkat II dan bukan kepada daerah tingkat I atau desa, karena pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Menurut Arsyad (2005) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Otonomi daerah memiliki tiga asas pada prinsip pelaksanaan. Yaitu :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

B. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (www.kemendes.go.id).

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan

pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun

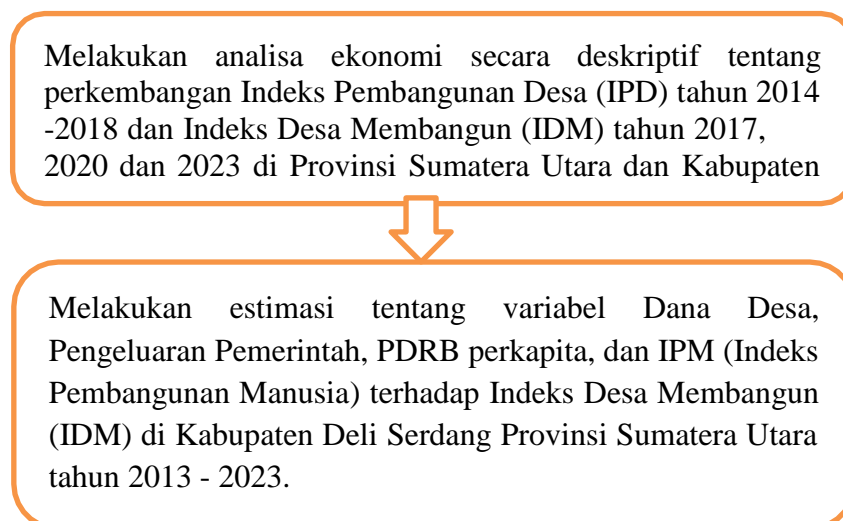
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.kemendes.go.id).

2.3 Penelitian Terdahulu

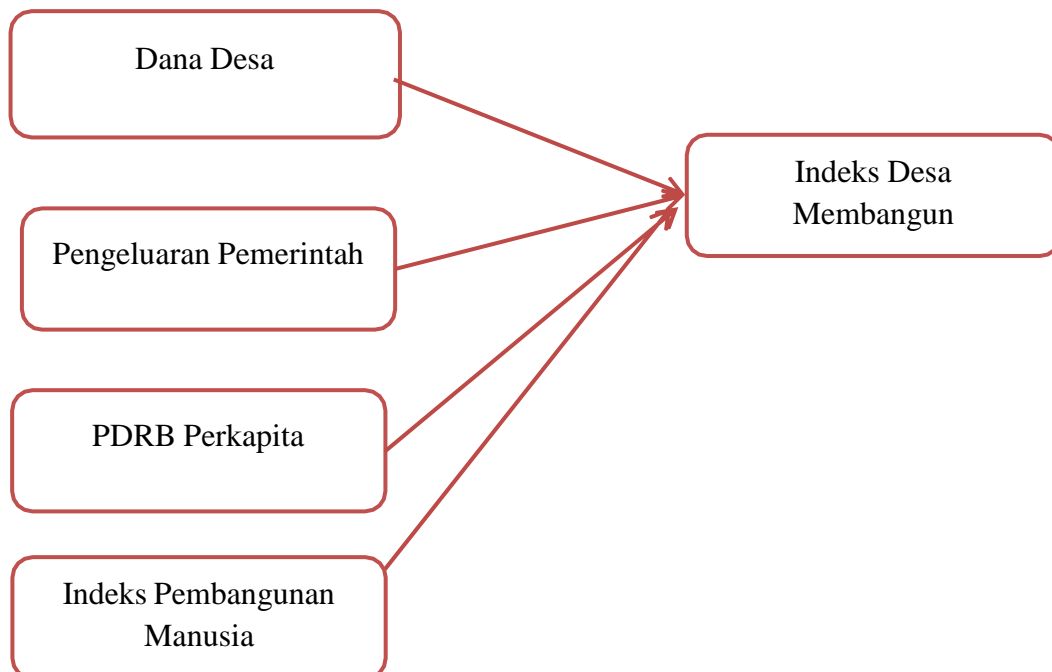
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
Anggun Ciptasari Nurana	Analisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan ciayun aja kuning	rasio belanja pembangunan, tenaga kerja	Terkjadinya fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 dengan total theil kawasan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerataan/penurunan ketimpangan perkembangan wilayah dengan hasil uji wilcoxon sebesar 0,500 pada masing-masing daerah dan 0,028 untuk total theil Ciayumajakuning, namun keduanya tidak mengindikasikan pemerataan.
Rizal Ramadhani	Pengaruh otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Sukabumi	Total PDRB, sektor perekonomian, sektor pertanian,	Menunjukkan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan rata-rata sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada periode otonomi daerah sebesar -0,11 persen menjadi 9,20 persen pada masa otonomi daerah
Sihombing	Dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara	Sektor ekonomi	Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara sebelum otonomi daerah termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat, sesudah ada otonomi daerah, pertumbuhan ekonominya menjadi <i>progresif</i> (maju)

Gambar 2.2 kerangka pemikiran



2.4 Kerangka Konseptual Model Ekonometrika



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Model Ekonometrika

2.5 Hipotesis

Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori pemecahan masalah tertentu.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari observasi lapangan di tempat penelitian, dan data sekunder di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Tempat dan waktu penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 3 bulan terhitung dari bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numeric, sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat yang dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan sumber data tersedut antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDES)
3. Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Defenisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
IDM	Indeks Desa Membangun (Tahun)	Variabel terikat	www.kemendes.go.id
DD	Dana Desa (Rupiah)	Variabel Bebas	www.deliserdang.kab.go.id
PP	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	Variabel bebas	www.deliserdang.kab.go.id
PDRB_PK	PDRB Perkapita (Rupiah)	Variabel bebas	www.deliserdang.kab.bps.go.id
IPM	Indeks Pembangunan Manusia (Tahun)	Variabel bebas	www.deliserdang.kab.bps.go.id

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website resmi kementerian keuangan (kemenkeu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan data kurun waktu (*cross section*) di kabupaten Deli Serdang. Kemudian penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini.

3.6 Model Estimasi

Model 1.

$$IDM_t = \beta_0 + \beta_1 DD_t + \beta_2 PP_t + \beta_4 PDRB_PK_t + \beta_5 IPM_t + \epsilon_t$$

Dimana:

IDM_t	: Indeks Desa Membangun
DD_t	: Dana Desa
PP_t	: Pengeluaran Pemerintah
$PDRB_PK_t$: PDRB per kapita
IPM_t	: Indeks Desa Membangun
β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien
T	: Unit Waktu (2013-2023)
ϵ_t	: <i>term of error</i>

3.7 Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data *time series* yaitu data silang tempat (*cross section*) dengan objek penelitian Kabupaten Deli Serdang data runtut waktu (*time series*) dalam kurun waktu 5 tahun (dari tahun 2013 sampai 2023). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier

berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linier dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata : disturbance term = 0
2. Tidak terdapat korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance term $COV(\mu_t, \mu_j) = 0 : t \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance term $Var(\mu_t) = \sigma^2$. Covariance antara μ_t dari setiap variabe bebas (x) = 0
4. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan
5. Tidak terdapat *collinerity* antar variabel-variabel bebas. Artinya varabel variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya
6. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi *gauss – markov*) maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*)

3.8 Teknik analisis data

3.8.1 Metode analisis deskriptif

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam

bentuk table, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3.8.2 Analisis Ekonometrika

3.8.2.1 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependennya. (Kuncoro, 2003)

3.8.2.2 Pengujian (Test Diagnostic)

a. Uji Individual (Uji t – Statistik)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji Statistik t

Koefisien regresi dapat diketahui dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{a_i}{se a_j} \dots\dots\dots(3-4)$$

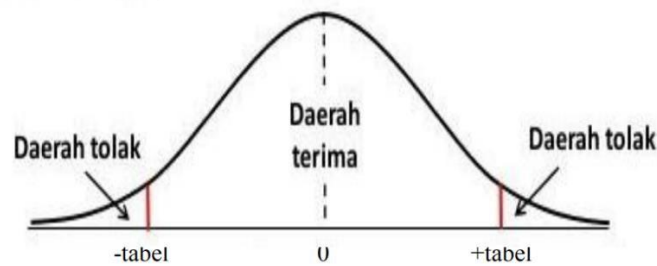
dimana: a_i : koefisien regresi
 se : standar error
 i : 1,2,3....n
 j : 1,2

dibandingkan dengan $t_{\text{tabel}} : \pm t (\alpha/2, n-1)$.

1. Kriteria Uji

Terima H_0 jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < +t_{\text{tabel}}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva normal t.



Gambar 3.1. Grafik kriteria pengujian hipotesis

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai $\text{sig} < \alpha = 5\%$

2. Uji Statistik F

$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3-5)$$

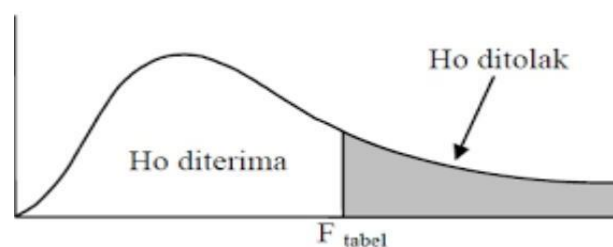
dimana: k : Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta
n : Jumlah observasi

Dibanding dengan $F_{\text{tabel}} = F (\alpha, n-k-1)$

1. Kriteria Uji

Terima H_0 jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F



Gambar 3.2. Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis Uji f

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai $\text{sig} < \alpha = 5\%$

2. Kesimpulan

Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini meliputi :

3.8.3.1 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2001). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah melihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi (Santoso, 2000).

3.8.3.2 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi

heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, maka analisa yang dilakukan adalah dengan metode informal.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat atau perkalian variabel bebas. Nilai yang dapat digunakan untuk menghitung, dimana $= n^*$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability observation R-square* lebih besar dari taraf nyata 5 %. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam bentuk model ditolak.

3.8.3.3 Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan pada model, memasukkan variabel yang penting, akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang estimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan uji *Durbin Waston* atau *Durbin Watson Test*. Dimana apabila d_1 dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada pada $1,54 < DW < 2,46$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *non autocorrelation* (Ariefianto, 2012)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografi

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh,
- Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

4.1.2 Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 Ha (26,30 persen) yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 Km.
2. Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80 persen) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang.

3. Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 Ha (44,90 persen) yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian Selatan terdapat wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan lereng, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar antara 0 - 15 persen. Namun pada daerah tertentu, terdapat kemiringan yang relatif bergelombang hingga terjal dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 - 40 persen. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Keadaan ketinggian lereng Kabupaten Deli Serdang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut, terdapat seluas ± 218.157 Ha (87,34 persen), yang terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah.
- b. Ketinggian 500 - 1.000 meter di atas permukaan laut, terdapat seluas ± 28.731 Ha (11,50 persen), yang meliputi lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru dan Kecamatan STM Hilir.
- c. Ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, terdapat seluas ± 2.884 Ha (1,15 persen), yang terdapat di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, dan Kecamatan Kutalimbaru.

4.1.3 Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Dikenal sebagai salah satu dari 33 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang menjadikannya sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Deli Serdang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Gunung Meriah	1.736	1.637	3.373
S.T.M. Hulu	6.898	7.171	14.069
Sibolangit	10.189	10.441	20.630
Kutalimbaru	18.571	18.968	37.539
Pancur Batu	48.522	48.542	97.064
Namo Rambe	20.453	20.578	41.031
Biru-Biru	20.604	20.244	40.848
S.T.M. Hilir	17.083	17.207	34.290
Bangun Purba	12.828	12.685	25.513
Galang	37.250	36.333	73.583
Tanjung Morawa	119.026	116.532	235.558
Patumbak	51.692	50.092	101.784
Deli Tua	31.018	30.842	61.860
Sunggal	125.889	125.699	251.588
Hampan Perak	86.304	83.012	169.316
Labuhan Deli	35.506	34.471	69.977
Percut Sei Tuan	211.381	211.639	423.020
Batang Kuis	34.792	33.762	68.554

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://deliserdangkab.bps.go.id>)

Bedasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 tercatat 2.018.164 jiwa dengan rincian 1.014.629 jiwa penduduk laki-laki dan 1.003.535 jiwa penduduk perempuan.

Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Percut Sei Tuan dengan jumlah penduduknya 423.020 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Gunung Meriah dengan 3.373 jiwa.

b) Angkatan Kerja

Berikut ini merupakan data jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	608.422	395.573	1.003.995
1. Bekerja	569.624	347.799	917.423
2. Pengangguran	38.798	47.774	86.572
Bukan Angkatan Kerja	132.842	347.829	480.671
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82,08	53,21	67,62
Tingkat Pengangguran	6,38	12,08	8,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://deliserdangkab.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 didominasi dengan angkatan kerja dengan total 1.003.995 individu dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 608.422 dan perempuan sebanyak 395.573. Dari total Angkatan kerja tersebut mayoritas dari mereka sedang aktif bekerja yaitu 917.423 orang, dengan jumlah laki-laki (569.624 orang) dan perempuan (347.799 orang). Sementara itu, pengangguran sebanyak 86.572 orang dengan proporsi laki-laki yang menganggur (38.798 orang) lebih besar daripada perempuan (47.774 orang). Sementara itu, terdapat 480.671 individu yang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja secara

keseluruhan mencapai 67,62%, dengan laki-laki memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi (82,08%) dibandingkan perempuan (53,21%). Tingkat pengangguran di populasi ini mencapai 8,62%, menunjukkan bahwa sebagian kecil dari angkatan kerja berada dalam kondisi mencari pekerjaan aktif.

4.1.4 Indikator Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang dalam memajukan ekonomi Sumatera Utara perkembangan ekonominya dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Deli Serdang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2019 – 2023.

Tabel 4.4 PDRB Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019 - 2023 (persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,38	0,74	2,84	5,10	2,29
Pertambangan dan Penggalian	4,65	- 0,57	4,11	4,79	3,42
Industri Pengolahan	3,82	- 1,92	2,82	1,01	2,00
Pengadaan Listrik dan Gas	4,88	5,03	3,73	4,63	2,21
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,44	3,66	7,23	0,94	1,49
Konstruksi	6,69	- 0,74	2,94	2,61	5,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,02	- 1,06	4,15	7,63	4,80
Transportasi dan Pergudangan	3,27	- 12,10	- 5,96	17,13	24,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,98	- 8,46	- 0,79	9,18	9,16
Informasi dan Komunikasi	7,89	8,83	7,96	8,73	6,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	2,13	4,76	4,80	4,78
Real Estat	6,84	1,57	- 1,33	3,50	2,55
Jasa Perusahaan	6,87	- 1,69	- 0,05	7,12	5,72

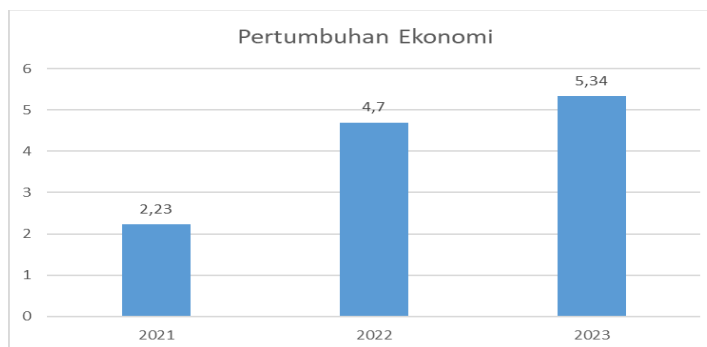
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,45	- 0,09	- 0,20	-0,26	1,50
Jasa Pendidikan	6,46	1,52	3,65	3,59	6,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,63	- 1,32	- 1,17	5,92	6,46
Jasa lainnya	6,35	- 3,74	1,84	6,76	6,94
Produk Domestik Regional Bruto	5,18	-1,78	2,23	4,70	5,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas Perekonomian Deli Serdang pada tahun 2023 mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya, Laju pertumbuhan PDRB Deli Serdang tahun 2023 mencapai 5,34 persen, sedang tahun 2022 juga mengalami akselerasi sebesar 4,70 persen, Pada tahun 2023, lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,49 persen, Selain itu lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,50 persen, Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 24,11 persen merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, disusul oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,16 persen, dan lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,94 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Deli Serdang

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021,2022 dan 2023

Pertumbuhan ekonomi Deli Serdang dari 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan yang rendah pada tahun 2021 (2,23%) akibat dampak pandemi, namun menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2022 (4,7%) dan 2023 (5,34%). Pada 2021, sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan transportasi mungkin mengalami penurunan akibat pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Namun, pada 2022, seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan pelonggaran pembatasan, sektor-sektor ini mulai bangkit. Selain itu, sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor utama di Deli Serdang kemungkinan berperan penting dalam pemulihan, karena lebih tahan terhadap krisis global.

Pada 2023, pertumbuhan yang mencapai 5,34% mengindikasikan bahwa wilayah ini telah berhasil memanfaatkan pemulihan global dan domestik, dengan sektor-sektor utama kembali beroperasi pada kapasitas penuh. Kenaikan ini juga bisa mencerminkan keberhasilan dalam menarik investasi dan mengoptimalkan infrastruktur, terutama dengan lokasinya yang dekat dengan kota besar seperti Medan.

3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi, PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun,

Tabel 4.5 PDRB Per Kapita Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2019-2023 (ribu rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2019	49.166,87	4,87	32.323,39	1,96
2020	57.121,60	16,18	36.611,69	13,27
2021	58.963,62	3,22	36.907,07	0,81
2022	64.185,93	8,86	38.028,82	3,04
2023	68.922,90	7,38	39.443,62	3,72

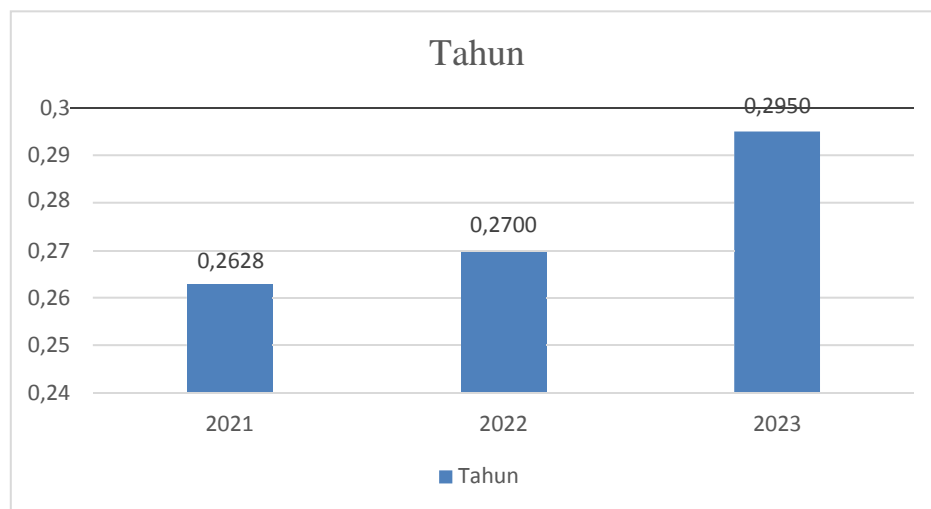
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas PDRB Per Kapita Deli Serdang atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 49,17 juta rupiah dan meningkat menjadi 68,92 juta rupiahtahun 2023, Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, Dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2019 – 2023 terjadi peningkatan yang cukup bervariasi, dan pada tahun 2023, PDRB per kapita Deli Serdang atas dasar harga konstan meningkat menjadi 39,44 juta rupiah, Berdasarkan atas dasar hargakonstan 2010, pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2019 selalu mengalami akselerasi, hingga tahun 2023 meningkat sebesar 3,72 persen.

4 Gini Rasio

Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro,2000).

Tabel 4.6 Gini Rasio



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Gambar 4.3 Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi selama periode 2021 sampai 2023. Tahun 2021 menjadi tahun yang memiliki distribusi yang lebih merata dibandingkan tahun lainnya dengan nilai Gini Ratio 0,2628. Sementara itu pada tahun 2022, Gini ratio mencatat nilai 0,2700 menunjukkan sedikit peningkatan, namun kembali naik menjadi 0,2950 pada tahun 2023.

4.1.5 Indikator Sosial

1. Kemiskinan

Berikut ini angka kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut:

Tabel 4.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang

Kemiskinan	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	92.524	85.280	82.750
Persentase	4.01	3.62	3.44
Garis Kemiskinan	428.123	448.489	479.509
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.56	0.62	0.34
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.13	0.20	0.07

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Dilihat dari tabel diatas perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 82.750 (ribu jiwa). Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang masih berada pada angka 92.524 (ribu jiwa). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga menunjukkan variasi, mulai dari 4,01% pada tahun 2019 hingga 3,44% pada tahun 2023. Garis kemiskinan, yang menetapkan batas moneter untuk kemiskinan, mengalami peningkatan dari Rp428.123,00 pada tahun 2021 menjadi Rp479.509,00 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode tiga tahun tersebut, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 dan penurunan yang nyata pada tahun 2023.

2. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

1. Harapan lama Sekolah

Tabel 4.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang

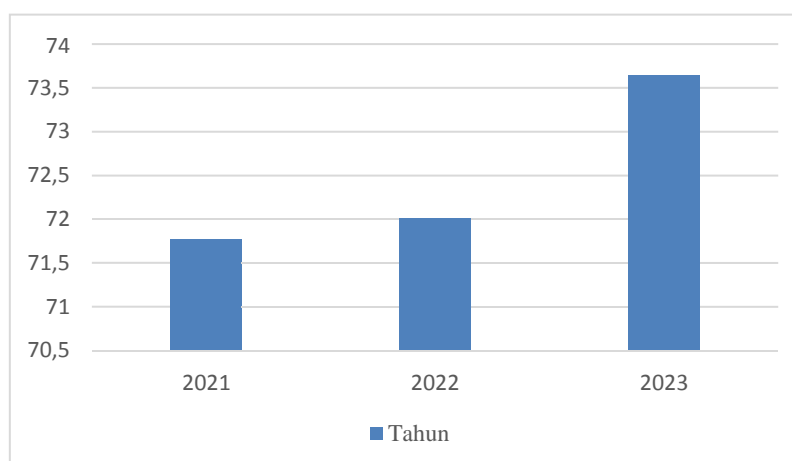
Harapan Sekolah	Tahun		
	2021	2022	2023
Lama Sekolah	13,36	138	13,39
Target Sekolah	10,10	10,27	11,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas harapan lama sekolah di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan pada tahun 2023 di bandingkan tahun 2022. Dengan jumlah lama sekolah yaitu sebanyak 13,36 pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 13,39. Sedangkan pada target mengalami keikan dari tahun 2021 sebanyak 10,10 dan 2023 sebanyak 11,19.

2. Harapan Hidup

Tabel 4.8 Harapan Hidup



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

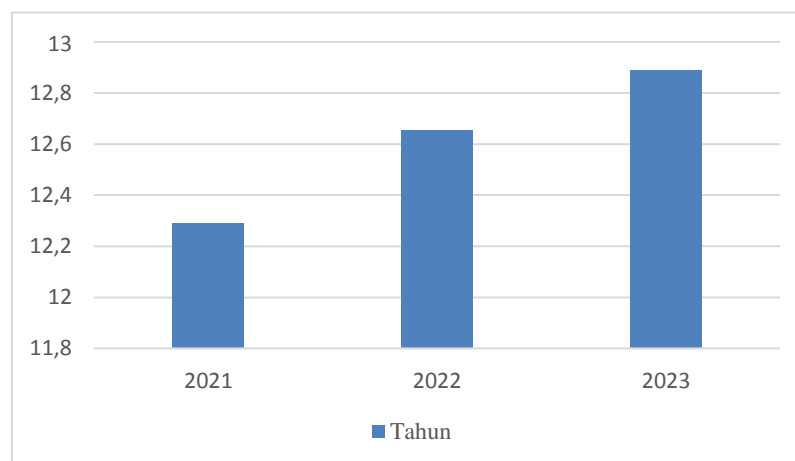
Gambar 4.4 Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas Harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebanyak 71,77. Di tahun 2022 72,07 dan pada tahun 2023 sebanyak 73,65.

3. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Tabel 4.12 Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebanyak Rp 12.291. Di tahun 2022 Rp 12.657 dan pada tahun 2023 sebanyak Rp 12.890 .

4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang.

4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cuci kakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) menjadi 5 (lima) dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar yaitu mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta

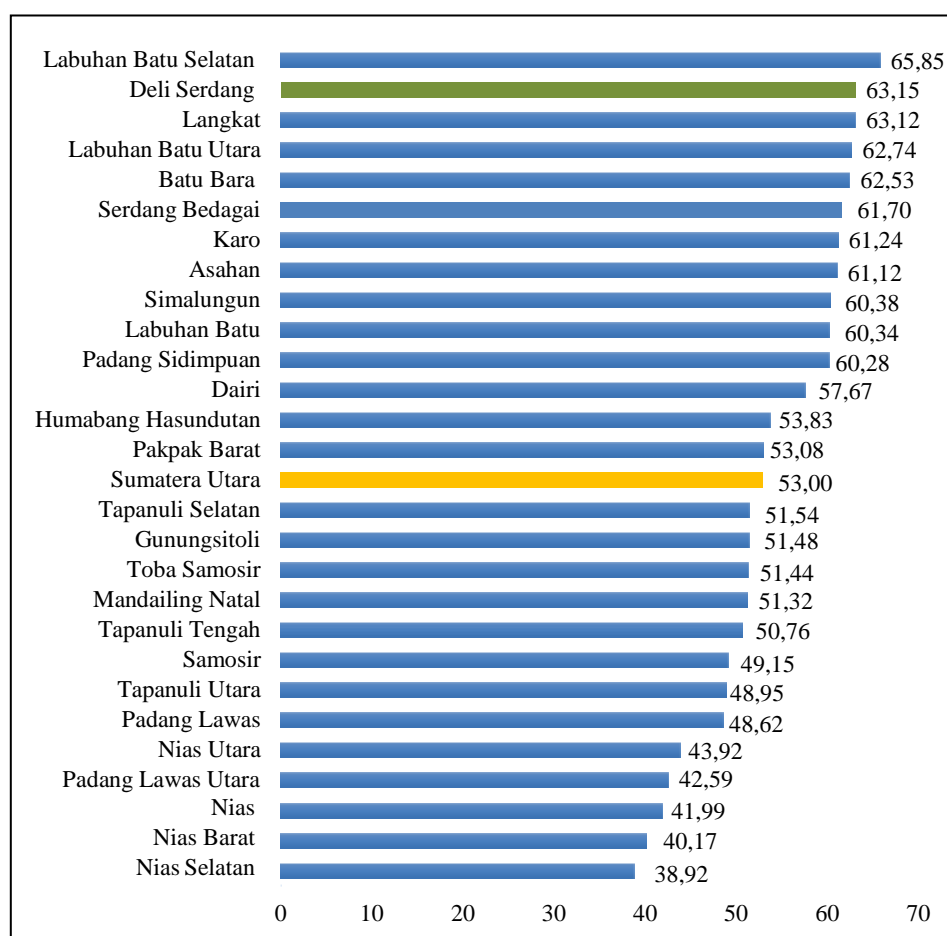
ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.

2. Kondisi Infrastruktur yaitu mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
3. Aksesibilitas/Transportasi yaitu dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke

kantor bupati/ walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2018, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat- pusat pemerintahan.

4. Pelayanan Umum yaitu upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2018. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel- variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
5. Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah

indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.



Berkaitan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara

beberapa tahun belakangan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2014 dan tahun 2018. Adapun Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 yakni, sebagai berikut

Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2014

(Sumber: Podes BPS, 2018)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks pembangunan desa paling tinggi di Sumatera Utara adalah kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan taraf 65,85 dan posisi kedua di tempati oleh kabupaten Deli Serdang dengan taraf 63,15, sedangkan kabupaten Mandailing natal indeks pembangunan desa cukup rendah hanya sebesar 51,32, dimana IPD tersebut masih dibawah rata-rata IDP Sumatera Utara dengan taraf 53,00.

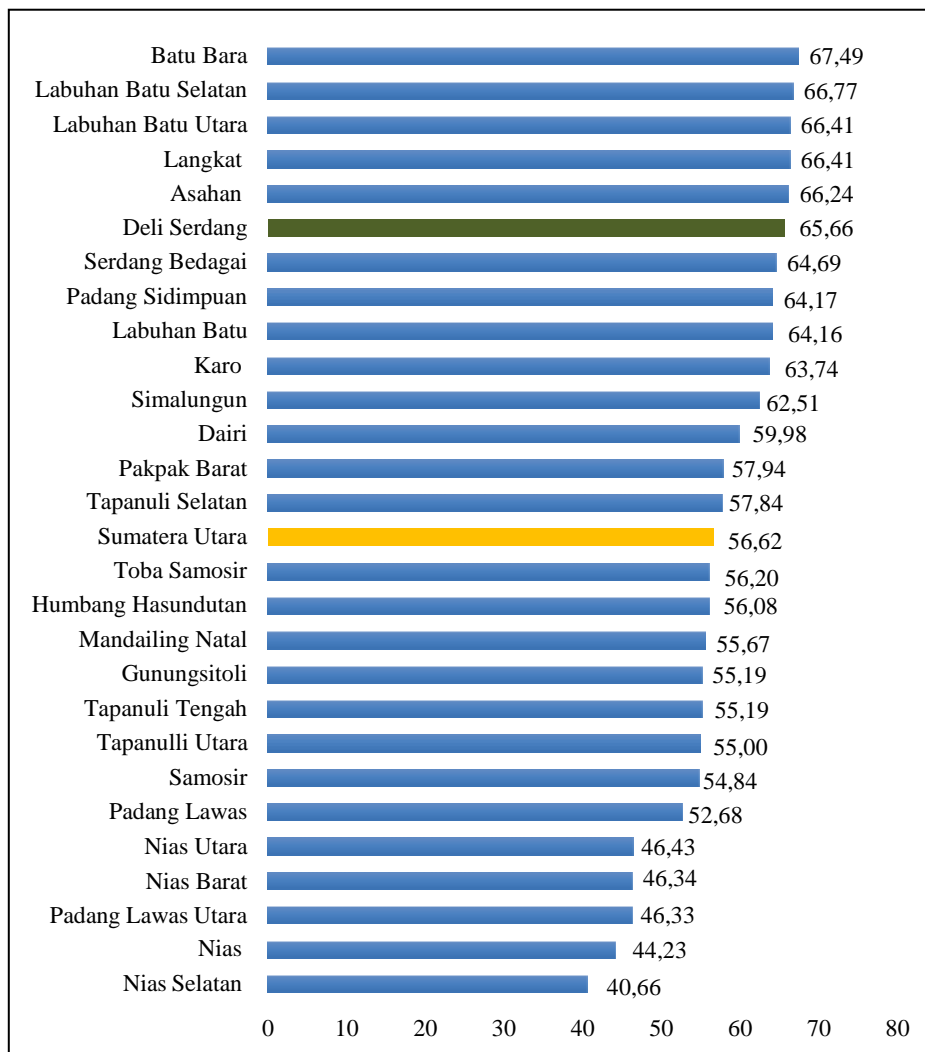
**Tabel 4.13 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Sumatera Utara Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
N i a s	41.99	39.14	25.56	66.05	44.72	40.82	80.59	19.41	0,00	170
Mandailing Natal	51.32	50.26	33.15	78.96	48.18	48.01	40.32	59.68	0,00	377
Tapanuli Selatan	51.54	51.35	33.35	82.85	45.51	41.71	32.56	67.44	0,00	215
Tapanuli Tengah	50.76	54.53	32.79	74.49	45.66	41.81	44.03	55.97	0,00	159
Tapanuli Utara	48.95	49.89	36.56	77.75	39.31	30.57	48.96	51.04	0,00	241
Toba Samosir	51.44	50.87	41.53	72.27	39.49	49.14	36.96	62.61	0.43	230
Labuhanbatu	60.34	64.08	44.46	76.86	57.26	58.13	12,00	85.33	2.67	75
A s a h a n	61.12	64,80	52.04	69.73	56.92	59.19	3.95	94.92	1.13	177
Simalungun	60.38	61.14	49.67	80.46	48.04	57.65	10.36	87.56	2.07	386
D a i r i	57.67	65.18	38.57	82.12	41.74	49.61	11.94	88.06	0,00	134
K a r o	61.24	62.56	45.11	87,90	42.89	63,20	10.98	86.67	2.35	255
Deli Serdang	63.15	66,10	51.85	78.33	51.04	64.18	10.53	75.53	13.95	380
L a n g k a t	63.12	67.96	50.17	74,30	53.59	67.21	4.17	93.75	2.08	240
Nias Selatan	38.92	39.51	20.53	58.27	39.84	42.61	84.97	15.03	0,00	459
Humbang Hasundutan	54.83	51.73	38.96	84.95	40.36	59.02	29.41	69.93	0.65	153
Pakpak Bharat	53.08	61.69	33.53	73.28	39.16	48,70	32.69	67.31	0,00	52
Samosir	49.15	49,70	33.78	73.55	38.62	48.02	58.59	41.41	0,00	128
Serdang Bedagai	61.7	66.41	51.99	72.73	52.13	59.03	7.17	90.72	2.11	237
Batu Bara	62.53	69.01	51.55	78.67	48.66	52.22	2.13	97.87	0,00	141
Padang Lawas Utara	42.59	36,90	27.98	72.02	43,30	37.68	69.95	30.05	0,00	386
Padang Lawas	48.62	49.69	31.46	75.78	44.49	38.45	58.75	40.92	0.33	303
Labuhanbatu Selatan	65.85	69,30	50.07	82.54	65.08	61.57	0,00	96.15	3.85	52
Labuhanbatu Utara	62.74	68.54	46.62	76.12	57,90	62.53	4.88	92.68	2.44	82

Nias Utara	43.92	45.94	23.79	64.19	47.36	43.13	73.21	26.79	0,00	112
Nias Barat	40.17	39.75	21.41	58,30	45.81	45.33	87.62	12.38	0,00	105
Padangsidempuan	60.28	69.25	39,80	81.37	44.99	56.69	4.76	95.24	0,00	42
Gunungsitoli	51.47	61.07	35.31	65.47	39,70	45.87	45.92	54.08	0,00	98
Sumatera Utara	53,00	54.34	38,15	74.58	46.01	49.97	37.15	61.22	1.63	5389

(Sumber: Podes BPS, 2014)

Berdasarkan tabel dimensi IPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 di atas, maka Kabupaten Deli Serdang dengan total Desa sebanyak 380 Desa memiliki sistem Pelayanan Dasar yang mencapai taraf 66,10 dengan Kondisi Infrastruktur sebesar 51,85 serta tingkat Aksesbiliti/Transportasi sebesar 78,33 dan Pelayanan Umum memiliki taraf 51,04 dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 64,18. Selanjutnya, jika melihat hasil IPD Sumatera Utara Tahun 2018, maka tergambar sebagai berikut:



Grafik 4.14 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018
(Sumber: Podes BPS, 2018)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks pembangunan desa paling tinggi di Sumatera Utara adalah kabupaten Batu Bara dengan taraf 67,49 dan posisi kedua di tempati oleh kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan taraf 66,77, sedangkan kabupaten Deli Serdang indeks pembangunan desanya diatas rata-rata Sumatera Utara yaitu sebesar 65,66 , sedangkan rata-rata IDP Sumatera Utara adalah 56,62.

Tabel 4.15 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	IPD 2018	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Nias	44,23	39,28	25,91	67,76	50,94	50,76	74,12	25,29	0,59	170
Mandailing Natal	55,67	53,77	37,09	82,03	50,62	60,09	23,61	75,86	0,53	377
Tapanuli Selatan	57,84	53,76	37,42	87,02	48,35	72,24	14,15	85,85	0,00	212
Tapanuli Tengah	55,19	56,71	36,03	80,06	46,66	56,96	26,42	73,58	0,00	159
Tapanuli Utara	55,00	51,97	43,09	78,65	41,63	60,85	28,63	70,95	0,41	241
Toba Samosir	56,20	50,64	46,37	77,95	44,58	66,59	21,21	77,92	0,87	231
Labuhanbatu	64,16	65,55	49,15	77,95	64,81	68,35	1,33	90,67	8,00	75
Asahan	66,24	68,73	55,14	77,22	56,94	73,26	0,56	93,79	5,65	177
Simalungun	62,51	61,35	51,25	81,05	50,42	69,46	5,18	91,19	3,63	386
Dairi	59,98	59,18	42,90	84,74	45,86	69,76	9,32	89,44	1,24	161
Karo	63,74	62,66	46,83	91,41	48,56	69,62	6,18	89,96	3,86	259
Deli Serdang	65,66	66,35	54,90	81,83	55,76	68,20	6,84	72,11	21,05	380
Langkat	66,41	68,12	55,19	78,78	55,21	75,34	0,83	92,08	7,08	240
Nias Selatan	40,66	36,58	22,99	65,64	44,90	42,83	80,39	19,61	0,00	459
Humbang Hasundutan	56,08	49,13	43,06	86,30	41,59	65,05	21,57	75,82	2,61	153
Pakpak Bharat	57,94	60,82	40,02	79,12	40,94	68,21	19,23	78,85	1,92	52
Samosir	54,84	51,54	39,67	79,46	42,15	66,57	30,47	68,75	0,78	128
Serdang Bedagai	64,69	65,73	56,57	76,38	53,88	69,31	3,38	89,87	6,75	237
Batu Bara	67,49	71,01	56,70	80,66	54,33	70,45	0,00	91,49	8,51	141
Padang Lawas Utara	46,33	39,62	30,90	72,91	48,18	50,58	60,36	39,38	0,26	386
Padang Lawas	52,68	50,19	35,54	77,72	50,52	55,10	39,93	59,08	0,99	303
Labuhanbatu Selatan	66,77	66,44	53,61	85,18	64,76	65,84	1,41	88,73	9,86	71
Labuhanbatu Utara	66,41	69,93	52,93	76,67	61,83	72,48	2,44	86,59	10,98	82
Nias Utara	46,43	44,83	22,40	70,34	54,92	53,65	66,07	33,93	0,00	112
Nias Barat	46,34	46,23	23,12	66,46	46,36	62,78	65,71	34,29	0,00	105
Padangsidempuan	64,17	68,32	44,82	92,08	48,60	59,96	2,38	95,24	2,38	42
Gunungsitoli	55,19	58,20	39,44	74,50	45,16	56,53	23,47	76,53	0,00	98
Sumatera Utara	56,62	54,94	41,71	78,33	49,76	62,43	27,02	69,30	3,68	5 437

(Sumber: Podes BPS, 2018)

Berdasarkan tabel dimensi IPD Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dianalisis bahwa Kabupaten Deli Serdang dengan total Desa sebanyak 3 Desa

memiliki sistem Pelayanan Dasar yang mencapai taraf 66,35 dengan Kondisi Infrastruktur sebesar 54,90 serta tingkat Aksesbiliti/Transportasi sebesar 81,83 dan Pelayanan Umum memiliki taraf 55,76 dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 68,20. Jika melihat perbandingan kedua dimensi IPD pada Kabupaten Deli Serdang yang dihitung pada Tahun 2014 dan Tahun 2018. Maka terlihat perbandingan sebagai berikut:

Tabel 4.16. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pada Kabupaten Deli Serdang dan Sumatera Utara

No	Kabupaten	IPD	2014					IPD	2018				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deli Serdang	63,15	66,10	51,85	78,33	51,04	64,18	65,66	66,65	54,90	81,83	55,76	68,20
2	Sumatera Utara	53,00	54,34	38,15	74,58	46,01	49,97	56,62	54,94	41,71	78,33	49,76	62,43

(Sumber: Kemendes, 2019)

Berdasarkan tabel perbandingan IPD di atas, terlihat bahwa indikator-indikator pembangunan desa seperti: pelayanan dasar, infrastruktur, aksesbiliti/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan terjadi peningkatan antara IPD tahun 2014 ke IPD tahun 2018 pada Kabupaten Deli Serdang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa IPD perbandingan tahun tersebut mengalami perkembangan.

4.2.2 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang

Konsep Indeks Membangun Desa (IDM) sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks

Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa.

Berdasarkan konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrata desa sudah memiliki 74 beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: (1) desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (2) desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ ” (Suroso, 2019).

Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa. Pertama adalah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Karakteristik desa ini memiliki beberapa konsep dalam pembangunannya seperti: pertama pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan dan kedua pengembangan sarana pembangunan terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan kegiatan baik itu produksi, distribusi, dan pemasaran. Selain itu untuk mendukung pengelolaan perekonomian desa pembentukan usaha ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan BUMDes sebagai aset yang dimiliki oleh desa.

Kedua adalah desa berkembang yang memiliki beberapa karakteristik meliputi: pembangunan serta pengembangan seluruh infrastruktur perekonomian mulai dari produksi, retribusi, dan pemasaran serta berusaha untuk dapat menjadi lumbu pangan dan usaha perekonomian masyarakat desa. Dalam hal pemeliharaan

infrastruktur desa desa berkembang berusaha untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa hingga dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Untuk mendorong hal tersebut penguatan perekonomian desa didukung oleh BUMDes sebagai akses perekonomian mulai dari pemberian modal, pengelolaan usaha, proses distribusi, dan terakhir proses pemasaran yang kesemuanya dipandu oleh pemerintah desa dalam rangka membantu 75 perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.

Ketiga adalah desa maju atau desa mandiri yang dicirikan sebagai sebuah desa yang memiliki baik itu pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur desa yang berbasis pada angka produktifitas yang difokuskan dalam sebuah produk unggulan. Proses pemberdayaan dan pemeliharaan infrastruktur didukung atas proses pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa didukung oleh produktifitas dari BUMDes yang berusaha untuk dapat melakukan suatu produksi, retribusi, dan pemasaran yang baik dan didukung oleh kualitas masyarakat desa dengan tujuan sebagai mata pencarian dan pengaktifan perekonomian masyarakat sekitar (Mohammad Soekarno, 2020).

Indikator desa membangun setidaknya ada 3 (tiga) dimensi yang dijelaskan di dalam Buku Indeks Desa Membangun Kemendes sebagai berikut:

Tabel 4.13 Indikator Variabel Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Dimensi	Variabel
1	Ketahanan Sosial	1.Modal Sosial 2. Akses Terhadap layanan dasar 3. Kesejahteraan masyarakat
2	Ketahanan Ekologi	1.Keanekaragaman Hayati 2. Kapasitas Regeneratif 3. pemanfaatan sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan 4. Daya Adaptasi Lingkungan
3	Ketahanan Ekonomi	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Ketersediaan Sumber daya Keuangan 3. Stabilitas Pasar Kerja 4. Akses Terhadap Pasar 5. Manajemen Risiko Ekonomi

Adapun Indeks Desa Membangun (IDM) per Desa pada yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

4.14 Indeks Membangun Desa (IDM) Pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2023

Kabupaten	IDM 2017	IDM 2020	IDM 2023
Deli Serdang	0.6033	0.6606	0.6992

Sumber: www.idm.go.id

Berdasarkan tabel di atas, secara umum perkembangan Indeks Membangun Desa (IDM) pada Kabupaten Deli Serdang ditahun 2017 sebanyak 0.6033, ditahun 2020 sebanyak 0.6606 dan pada tahun 2023 sebanyak 0.6992. Dapat di simpulkan bahwa perkembangan Indeks Membangun Desa (IDM) di kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan dari kurun waktu per 4 tahun kebelakang.

4.15 Indeks Membangun Desa (IDM) Pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2023

Provinsi	IDM 2017	IDM 2020	IDM 2023
Sumatera Utara	0.5489	0.6003	0.6436

Sumber: www.idm.go.id

Berdasarkan tabel di atas, secara umum perkembangan Indeks Membangun Desa (IDM) pada Provinsi Sumatera Utara ditahun 2017 sebanyak 0.5489, ditahun 2020 sebanyak 0.6003 dan pada tahun 2023 sebanyak 0.6436. Dapat di simpulkan bahwa perkembangan Indeks Membangun Desa (IDM) di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari kurun waktu per 4 tahun kebelakang.

Perkembangan IDM di Kabupaten Deli Serdang hal ini di dorong beberapa indikator yaitu: Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi dan Ketahanan Ekonomi sehingga dapat meningkatkan IDM di Kabupaten Deli Serdang. Dan di Sumatera Utara perkembangan IDM berdasarkan indikator : Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi dan Ketahanan Ekonomi sehingga mengalami peningkatan di Sumatera Utara.

4.3 Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mencapai IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.16 Hasil Olahan Regersi

Dependent Variable: IDM
Method: Least Squares
Date: 10/11/24 Time: 08:30
Sample: 2013 2023
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.167539	0.270639	-0.619049	0.5586
DD	1.080013	1.88E-13	0.574235	0.5867
PP	1.300011	1.24E-11	1.043538	0.3369
PDRB_PK	7.970009	2.49E-09	3.200250	0.0186
IPM	0.003511	0.004102	0.856024	0.4248
R-squared	0.901887	Mean dependent var		0.745091
Adjusted R-squared	0.836479	S.D. dependent var		0.034827
S.E. of regression	0.014083	Akaike info criterion		-5.384729
Sum squared resid	0.001190	Schwarz criterion		-5.203868
Log likelihood	34.61601	Hannan-Quinn criter.		-5.498737
F-statistic	13.78854	Durbin-Watson stat		1.341372
Prob(F-statistic)	0.003500			

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Dari hasil regresi diatas ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Dana Desa (DD) berpengaruh negatif terhadap variabel terikat Indeks Desa membangun (IDM) pada tingkat signifikansi 10% ($\alpha < 0,10$). Variabel Pengeluaran Pemerintah (PP) berpengaruh signifikan pada tingkat 5% ($\alpha < 0,05$). Sedangkan variabel Produk Domestik Bruto Regional Perkapita (PDRB_PK), signifikan dikarenakan menunjukkan probabilitas di bawah 15% ($\alpha < 0,015$). Hasil regresi juga menghasilkan nilai R-squared yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.0186 , artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Penaksiran

Tabel 4.16 Statistik Deskriptif

	IDM	DD	PP	PDRB_PK	IPM
Mean	0.745091	3.34E+11	3.14E+09	71873448	74.88273
Median	0.738000	3.39E+11	3.39E+09	70784632	75.43000
Maximum	0.811000	3.81E+11	3.62E+09	79603684	77.16000
Minimum	0.707000	2.74E+11	2.04E+09	68856090	71.98000
Std. Dev.	0.034827	3.06E+10	5.32E+08	3137838.	1.650964
Skewness	0.902998	-0.128322	-1.000701	1.538935	-0.352511

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Data penaksiran di atas menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk enam variabel: Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD) Dana Desa (DD), Pengeluaran Pemerintah (PP), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB_PK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian dari data ini:

1. Statistik Deskriptif Umum:

- Mean (Rata-rata):
 1. IDM: Rata-rata indeks desa membangun adalah 0.745091
 2. DD: Rata-rata Dana Desa yang dialokasikan adalah 3.34E+11.

3. PP: Rata-rata pengeluaran pe merintah adalah 3.14E+09.
 4. PDRB_PK: Rata-rata PDRB per kapita adalah 71873448
 5. IPM Rata-rata indeks pembangunan manusia adalah 74.88273.
- Median (Nilai tengah):
 1. IDM: Median IDM 0.738000.
 2. DD: Median Dana Desa adalah 3.39E+11.
 3. PP: Median pengeluaran pemerintah adalah 3.39E+09
 4. PDRB_PK: Median PDRB per kapita adalah 70784632.
 5. IPM : Median indeks pembangunan manusia adalah 75.43000.
 - Maximum (Maksimum):
 1. IDM: Nilai maksimum IDM adalah 0.811000.
 2. DD: Nilai maksimum Dana Desa adalah 3.81E+11.
 3. PP: Nilai maksimum Pengeluaran pemerintah adalah 3.62E+09.
 4. PDRB_PK: Nilai maksimum PDRB per kapita adalah -79603684.
 5. IPM : Nilai maksimum indeks pembangunan manusia adalah 77.16000.
 - Minimum :
 1. IDM: Nilai Minimum IDM adalah 0.707000.
 2. DD: Nilai Minimum Dana Desa adalah 2.74E+11.
 3. PP: Nilai Minimum Pengeluaran pemerintah adalah 2.04E+09.
 4. PDRB_PK: Nilai Minimum PDRB per kapita adalah 68856090.
 5. IPM : Nilai Minimum indeks pembangunan manusia adalah 71.98000

2. Standar Deviasi:

1. IDM Standar deviasi sebesar 0.034827.
2. DD: Standar deviasi Dana Desa adalah 3.06E+10.
3. PP: Standar deviasi Pengeluaran pemerintah adalah 5.32E+08.
4. PDRB_PK: Standar deviasi PDRB per kapita adalah 3137838.
5. IPM : Standar deviasi indeks pembangunan manusia adalah 1.650964.

3. Statistik Distribusi: Skewness (Kemiringan):

1. IDM: Kemiringan 0.902998 menunjukkan distribusi IDM sedikit condong ke kiri (distribusi positif).
2. DD: Kemiringan -0.128322 menunjukkan distribusi Dana Desa hampir simetris.
3. PP: Kemiringan -1.000701 menunjukkan distribusi pengeluaran pemerintah condong ke kiri (distribusi negatif).
4. PDRB_PK: Kemiringan 1.538935 menunjukkan distribusi PDRB per kapita (distribusi positif).
5. IPM: Kemiringan -0.352511 menunjukkan distribusi pengeluaran pemerintah condong ke kiri (distribusi negatif).

Tabel4.17 Ringkasan Hasil Pengolahan Olahan

Variabel	OLS (Ordinary least Square) Setelah dilakkan Logaritma Natural (LN)
DD	1.080013 (0.574235)
PP	1.300011 (1.043538)
PDRB-PK	7.970009 (3.200250)

IPM	0.003511
	(0.856024)
Cons	-0.167539
	(-0.619049)
Numb of Obs	10
Adj R Squared	0.836479
R (Corelation)	90.18%
Uji F	13.78854
	(0.003500)
D-W (Durbin-Watson)	1.341372

A. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R-squared*) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel dana desa (DD), pengeluaran pemerintah (PP), produk domestik bruto regional perkapita (PDRB-PK), Indeks pembangunan manusia (IPM) dalam menjelaskan variabel terikat indeks desa membangun (IDM). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai *R-squared* sebesar 0,90, artinya kontribusinya sebesar 90,00%. Sedangkan sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada disturbance error term.

B. Interpretasi Hasil

Dari Hasil Regersi diatas maka model ekonometrikanya yaitu :

$$\text{IDM}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{DD}_t + \beta_2 \text{PP}_t + \beta_3 \text{PRRB PerKapita}_t + \beta_4 \text{IPM} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut :

$$\text{IDM}_t = (-0,167539) + 1.080013 \text{DD}_t + 1.300011 \text{PP}_t + 7.970009 \text{PDRB PerKapita} + 0.003511 \text{IPM}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

Koefisien $\beta_0 = -0,167539$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika indeks desa membangun (IDM), dana desa (DD), pengeluaran pemerintah (PP) , produk domestik regional bruto perkapita (PDRB-PK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) naik maka diperkirakan tingkat indeks desa membangun sebesar 0.17%, dan dari hasil olahan diatas ternyata tidak signifikan karena nilai probabilitas nya sebesar 0.5586 ($\alpha > 0,5$). Maksudnya tidak benar yang diprediksi jika indeks desa membangun, dana desa, pengeluaran pemerintah, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia tidak ada.

Koefisien $\beta_1 = 1.080013$, artinya jika dana desa (DD) meningkat 1% maka diperkirakan indeks desa membangun (IDM) juga meningkat sebesar 1.080013 persen dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.5867 diatas dari tingkat kesalahan 15%.

Koefisien $\beta_2 = 1.300011$, artinya jika pengeluaran pemerintah (PP) meningkat 1% maka diperkirakan indeks desa membangun (IDM) akan meningkat sebesar 1.300011 persen dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.3368 diatas dari tingkat kesalahan 15%.

Koefisien $\beta_3 = 7.970009$, artinya jika produk domestik regional bruto perkapita (PDRB-PK) meningkat 1% maka diperkirakan indeks desa membangun (IDM) akan meningkat sebesar 7.970009 persen dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0186 dibawah dari tingkat kesalahan 15%.

Koefisien $\beta_4 = 0.003511$, artinya jika indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat 1% maka diperkirakan indeks desa membangun (IDM) akan meningkat sebesar 0.003511 persen dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.04248 (diatas dari tingkat kesalahan 15%.

4.3.1 Pengujian (Test Diagnostic)

a) Uji Individual (Uji t – Statistik)

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh Variabel, Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Desa Membangun terhadap Indeks Pembangunan Desa. Adapun hipotesis dalam uji T sebagai berikut :

a Berdasarkan perbandingan t-statistic dengan t table

- Model: $df(n)-k = 11-2= 9$, $\alpha = 5\%$ maka nilai t_{tabel} sebesar 2,26
- Tidak berpengaruh jika nilai t-statistic < t table
- Berpengaruh jika nilai t-statistic > t table

b. Berdasarkan probabilitas

- Tidak berpengaruh jika nilai Prob > 0,05
- Berpengaruh jika nilai Prob < 0,05

Tabel Hasil Uji t – Statistik

Dependent Variable: IDM
 Method: Least Squares
 Date: 10/11/24 Time: 08:31
 Sample: 2013 2023
 Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.167539	0.270639	-0.619049	0.5586
DD	1.08E-13	1.88E-13	0.574235	0.5867
PP	1.30E-11	1.24E-11	1.043538	0.3369
PDRB_PK	7.97E-09	2.49E-09	3.200250	0.0186
IPM	0.003511	0.004102	0.856024	0.4248

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel dependen secara Parsial adalah sebagai berikut:

- a) Nilai t hitung Variabel Indeks Pembangunan Desa sebesar $-0.619049 >$ nilai t tabel yaitu 0.61 atau Nilai probability $0,5586 > 0,15$, artinya Indeks Pembangunan Desa tidak ada hubungan yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.
- b) Nilai t hitung Variabel Dana Desa sebesar $-0.574235 >$ Nilai t tabel yaitu 0.57 atau Nilai probability $0,5867 > 0,15$, artinya Dana Desa tidak ada hubungan yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.
- c) Nilai t hitung Variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar $1.043538 >$ nilai t tabel yaitu 1.04 atau Nilai probability $0,3369 > 0,15$, artinya Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.
- d) Nilai t hitung Variabel PDRB Perkapita sebesar $3.200250 >$ nilai t tabel yaitu 3.20 atau Nilai probability $0.0186 < 0,05$, artinya PDRB Perkapita

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. PDRB_PK mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara langsung, yang berdampak besar pada kualitas hidup dan pembangunan desa, tercermin dalam nilai IDM. Pengaruh variabel lainnya pada IDM lebih tidak langsung. Keberhasilan pembangunan desa kerap diukur melalui indikator ekonomi seperti PDRB_PK, yang lebih konkret dalam mencerminkan pertumbuhan ekonomi dibanding variabel lain.

- e) Nilai t hitung Variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.856024 > nilai t tabel yaitu 0.85 atau Nilai probability 0,4248 > 0,15, artinya Indeks Pembangunan Manusia tidak ada hubungan yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

b. Uji Statistik F

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen.

Tabel Hasil Uji F

R-squared	0.901887	Mean dependent var	0.745091
Adjusted R-squared	0.836479	S.D. dependent var	0.034827
S.E. of regression	0.014083	Akaike info criterion	-5.384729
Sum squared resid	0.001190	Schwarz criterion	-5.203868
Log likelihood	34.61601	Hannan-Quinn criter.	-5.498737
F-statistic	13.78854	Durbin-Watson stat	1.341372
Prob(F-statistic)	0.003500		

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Nilai F-statistik sebesar 13.78854 dan probabilitas 0.003500 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen pada tingkat signifikansi 5%, karena p-value lebih kecil dari 0.05.

c. Uji Asumsi Klasik

1 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model tidak ada ditemukan multikolinearitas, karena tidak ada tanda koefisien yang berubah (sesuai dengan hipotesa). Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), apabila Tolerance lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/11/24 Time: 08:31
Sample: 2013 2023
Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.073245	4062.349	NA
DD	3.55E-26	221.3576	1.676753
PP	1.54E-22	86.39849	2.197668
PDRB_PK	6.20E-18	1780.435	3.079681
IPM	1.68E-05	5235.079	2.312334

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Dari hasil olah data multikolinearitas dari output EViews yang kamu berikan: VIF (Variance Inflation Factor) Terpusat (Centered VIF). Angka VIF yang terpusat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas antar variabel independen. Umumnya, jika VIF di atas 10, itu menandakan adanya multikolinearitas yang kuat.

Hasil VIF terpusat (Centered VIF) dari data adalah DD (1,68) – Tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan. PP (2,20) – Tidak ada multikolinearitas yang signifikan. PDRB_PK (3,08) – Tidak ada multikolinearitas yang signifikan. IPM (2,31) – Tidak ada multikolinearitas yang signifikan.

2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.137071	Prob. F(4,6)	0.4221
Obs*R-squared	4.743057	Prob. Chi-Square(4)	0.3147
Scaled explained SS	0.698346	Prob. Chi-Square(4)	0.9515

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (4) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0.3147. Oleh karena p value $0.3147 < 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi.

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.070135	Prob. F(2,4)	0.4244
Obs*R-squared	3.834192	Prob. Chi-Square(2)	0.1470

Sumber: E-Views 12 dan diolah

Hasil Uji Breusch-G Odfery Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa nilai prob.Chi-Square (2) sebesar $0,1470 < 0,05$, Maka tidak ada masalah Autokorelasi atau lolos uji autokorelasi.

4.2 Pembahasan Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada periode 2011-2023 menunjukkan hasil yang bervariasi:

1. Variabel Dana Desa (DD):

Koefisien sebesar $1.08E-13$ dengan p-value 0.5867. Ini menunjukkan bahwa DD tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM karena p-value jauh di atas 0,05. Artinya, alokasi Dana Desa belum memberikan pengaruh yang jelas pada peningkatan IDM dalam periode yang diobservasi.

2. Pengeluaran Pemerintah (PP):

Koefisien 1.30E-11 dan p-value 0.3369 menunjukkan bahwa variabel ini juga tidak signifikan terhadap IDM. Meskipun ada hubungan positif kecil, signifikansi statistiknya lemah.

3. Produk domestik Bruto Perkapita (PDRB_PK)

Koefisien 7.97E-09 dengan p-value 0.0186. Ini berarti PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Dengan p-value di bawah 0,05, variabel ini berperan penting dalam menjelaskan peningkatan IDM. Setiap peningkatan PDRB per kapita secara signifikan meningkatkan Indeks Desa Membangun.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Koefisien 0.003511 dengan p-value 0.4248. IPM tidak signifikan dalam mempengaruhi IDM, meskipun koefisiennya positif. P-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan IDM tidak cukup kuat secara statistik pada sampel ini..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan variabel dependen IDM (Indeks Desa Membangun), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PDRB perKapita (PDRB_PK) merupakan satu-satunya variable yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan IDM. Peningkatan PDRB per kapita desa berhubungan positif dengan peningkatan pembangunan desa.
2. Dana Desa (DD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana desa diberikan, penggunaannya munglk belum optimal untuk mendukung pembangunan desa secara langsung, atau pengellaan dana desa belum diarahkan secara strategis untuk meningkatkan IDM.
3. Pengeluaran pemerintah (PP) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun. Ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah khususnya alokasi ke desa belum cukup efektif dalam mendukung pembangunan desa.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Ini dapat diartikan bahwa meskipun ipm merupakan indikator kemajuan manusia, peningkatan ipm belum mampu secara langsung mendorong peningkatan idm.
5. Nilai-p-value yang tinggi pada beberapa variable menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi IDM, yang belum tercakup dalam model ini.

5.2 Saran

1. Pengembangan kebijakan ekonomi desa, Peningkatan PDRB perKapita terbukti signifikan dalam mempengaruhi pembangunan desa. Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan produktivitas dan ekonomi desa melalui pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri kecil, dan pariwisata.
2. Evaluasi penggunaan Dana Desa (DD), Meskipun Dana Desa (DD) diberikan untuk mendorong pembangunan desa, hasil ini menunjukkan bahwa dampaknya pada IDM tidak signifikan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengevaluasi penggunaan dana lokasi Dana Desa agar lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan, serta memastikan dana tersebut dimanfaatkan sesuai tujuanyang tepat.
3. Pendalaman kajian tentang faktor kemiskinan dan IPM, Meskipun Persentase Penduduk Miskin (PP) dan IPM tidak signifikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan-kebijakan yang mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, serta bagaimana kaitannya dengan pembangunan desa yang lebih merata.
4. Pengembangan model yang lebih komprehensif, Sebaiknya dilakukan penambahan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap IDM, seperti infrastruktur, pendidikan, akses teknologi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IDM.

5. Pendalaman kajian tentang faktor kemiskinan dan IPM, Meskipun Persentase Penduduk Miskin (PP) dan IPM tidak signifikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan-kebijakan yang mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, serta bagaimana kaitannya dengan pembangunan desa yang lebih merata.
6. Pengembangan model yang lebih komprehensif, Sebaiknya dilakukan penambahan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap IDM, seperti infrastruktur, pendidikan, akses teknologi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M. N. 2012. *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan EViews*. Penerbit Andi.
- Arsyad, L. 2005. *Otonomi Daerah*. Rajagrafindo Persada.
- Aser, S. 2005. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Kencana Prenada Media Group.
- Bailey, K. D. 1995. *Methods of Social Research*. Free Press.
- Domar, E. D. 1957. *Essays in the Theory of Economic Growth*.
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Harrod, R. F. 1948a. *Economic Dynamics*.
- Harrod, R. F. 1948b. *Towards a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic Theory and Their Application to Policy*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Indeks Desa Membangun (Tahun)." www.kemendes.go.id.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Erlangga.
- Malthus, T. R. 1798. *An Essay on the Principle of Population*.
- Mangkoesoebroto, G. 1993. *Manajemen Keuangan Negara*. BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. 2003. *Macroeconomics*. . Worth Publishers.
- Manurung, A. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Erlangga.
- Marshall, A. 1890. *Principles of Economics*.
- Marx, K. 1967. *Das Kapital*.

Nugroho, R., & Dahuri, R. 2004. *Pembangunan Dan Kehidupan Bermasyarakat: Sebuah Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Serdang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli. “Indeks Pembangunan Manusia (Tahun).” www.deliserdangkab.bps.go.id.

Serdang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli. “PDRB Perkapita (Rupiah).” www.deliserdangkab.bps.go.id.

Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli. “Dana Desa (Rupiah).” www.deliserdangkab.go.id.

Statistik, Badan Pusat. 2018. “Indeks Pembangunan Desa (IPD).” <https://www.bps.go.id>.

Statistik, Badan Pusat. 2023. “Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Provinsi (Persen).” <https://www.bps.go.id>.

LAMPIRAN

a. Data mentah sebelum diregresi (diolah)

TAHUN	IDM	DD	PP	PDRB_PK	IPM
2013	-	312.277.329.000,00	2.038.823.949	68.856.090,41	76,82
2014	-	380.662.806.000,00	2.392.252.735	69.485.423,88	71,98
2015	-	380.662.806.117,00	2.745.309.963	69.645.925,12	72,79
2016	-	343.908.576.000,00	3.010.435.387	70.346.154,96	73,51
2017	0,6033	273.767.060.296,00	3.391.738.242	70.784.631,79	73,94
2018	-	323.958.125.900,00	3.438.938.263	71.668.215,43	74,92
2019	-	343.908.576.000,00	3.612.907.370	71.878.690,43	75,43
2020	0,6606	339.139.699.000,00	3.278.491.221	70.596.825,12	75,44
2021	-	312.546.966.000,00	3.412.777.564	72.173.623,32	75,53
2022	-	323.958.125.000,00	3.566.742.521	75.568.664,96	76,19
2023	0,6992	339.139.699.000,00	3.618.608.794	79.603.683,79	77,16